



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 07 April 2017

Halaman: 15

Memangkas Pekerjaan Infrastruktur

Wacana Pemerintah Pusat Revisi Alokasi DAK

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menghormati

keputusan pemerintah pusat untuk melakukan rencana revisi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018. Hanya saja, sosialisasi dan juga variabel yang memang membuat penyaluran DAK dimungkinkan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya bisa dioptimalkan.

"Pada prinsipnya kami tidak masalah jika ada revisi yang kemungkinan ada pengurangan DAK. Namun, sepanjang itu diinformasikan secara detail dan jelas variabelnya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Kamis (6/4).

Kadri menjelaskan, DAK dari tahun ke tahun di Kota Yogyakarta memang mengalami penurunan. Dia membandingkan dari tahun 2015 ke 2016 yang juga mengalami penurunan. Akan tetapi, pihaknya berupaya untuk menyesuaikan program dan

STORY HIGHLIGHT

- DAK ke Kota Yogyakarta dari tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan
- Meski ada wacana revisi alokasi DAK tahun 2018, rencana pekerjaan yang didanai tetap diusulkan
- Salah satu risiko jika rencana ini direalisasikan adalah pengurangan volume pekerjaan

rencana Pemkot dengan dana yang ada.

Menurutnya, DAK dari pemerintah pusat adalah dana perimbangan yang masuk ke Kota Yogyakarta. Besaran transfer pun ditentukan kemampuan keuangan pemerintah pusat. Jika memang ada penyesuaian bahkan kemungkinan buruk pengurangan, pihaknya akan tetap mengusulkan rencana program Pemkot yang didanai DAK. "Meski ada revisi dan pengurangan, akan tetap kami usulkan," ujarnya.

Dampak dari pengurangan DAK pun nantinya akan dirasakan dengan beberapa

rencana atau program kerja Pemkot yang tidak berjalan. Hal ini lantaran ada dua pos besar yang dialokasikan Pemkot dari sumber DAK yang bersifat fisik dan non fisik.

"Misalnya, kalau fisik ya nantinya perbaikan jalan bisa berkurang, dan beberapa pekerjaan infrastruktur bisa dipangkas atau ditunda," ulasnya. Wacana revisi penyaluran DAK 2018, akan sangat berdampak pada pekerjaan fisik yang dilakukan Pemda DIY pada tahun tersebut. Terlebih jika jumlahnya akan dikurangi, maka ada tiga risiko yang akan ditanggung Pemda DIY.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo menjelaskan bahwa konsekuensi dari memangkas DAK adalah pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai kontraknya.

"Misalkan daerah ada kelebihan uang, *uwarit nomboki disik kayak biasanya*. Tapi kalau nomboki dulu, kalau pusat enggak mengucurkan lagi, ya udah lewat. Risikonya begitu," urainya kepada *Tribun Jogja*.

Selain itu, pria yang akrab disapa BWH tersebut menjelaskan risiko selanjutnya adalah volume pekerjaan yang dikurangi. Misalkan dibangun gedung seluas 100 meter persegi, harus ada kebijakan yang nantinya untuk mengurangi luas gedung tersebut. Disesuaikan dengan anggaran yang ada. "Risiko ketiga, *ora bisa dilakoni kabeh (tidak jalan pengerjaan fisiknya)*," tuturnya.

DAK, lanjutnya, pelaksanaannya menggunakan juknis dari kementerian yang mengelola DAK. Hal tersebut membuat DAK tidak bisa diproyeksikan karena semua tergantung pada kementerian. Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan, rencana pemerintah untuk merevisi penyaluran DAK pada tahun depan. Revisi tersebut bertujuan agar alokasi anggaran mempertimbangkan prinsip keadilan. Termasuk juga pemerataan. Revisi ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. (tim kota/region)

Pit. Kepala

Instansi	Nilai
1.	☐ Ne
2.	☐ Pos
3.	☐ Net
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005